

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Raya Parigi – Karangbenda Tlp/Fax. (0265) 7500518 Parigi – Pangandaran

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2022 telah dapat disusun. Laporan Keuangan tersebut disusun sebagai Implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan-peraturan Perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berpedoman pada Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2022 terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, LRA, LO, LPE per 31 Desember 2022 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami yakin Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik redaksi maupun substansinya. Untuk itu perlu adanya perbaikan secara konstruktif agar sistem pelaporan keuangan ini lebih baik pada periode yang akan datang.

Demikian, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

RAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

NIP. 19720106 199803 1 002

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada akhir tahun anggaran 2022 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2022 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan

tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas pelaksanaan APBD Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2. Pos – Pos Neraca
- 5.3. Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.4. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.5. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB. II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2022.

1.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum.

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan wajib pemerintahan umum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			Indikator Kinerja Keluaran
Program	Penunjang	Urusan	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			

	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu
Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Program Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan tata kelola SPBE
Pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase tata kelola layanan informasi publik 2. Persentase tata kelola komunikasi publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan 2. Persentase pengelolaan media massa dan lainnya
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun
Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

BAB. III**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN****3.1.1. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan**

Program Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.508.855.377,00 terealisasi sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.085.992.393,00. Hasil pelaksanaan Program Belanja Daerah tersebut adalah meningkatnya kinerja Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program, kegiatan dan sub kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	Belanja Langsung	4.508.855.377	4.085.992.393	422.862.984	90,62
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	3.508.191.785	3.208.030.328	300.161.457	91,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah/Kota	21.000.000	18.450.000	2.550.000	87,86
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	18.450.000	2.550.000	87,86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.650.898.001	2.417.236.717	233.661.284	91,19
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.629.898.001	2.398.786.717	231.111.284	91,21
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.000.000	18.450.000	2.550.000	87,86
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000	18.450.000	2.550.000	87,86
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000	18.450.000	2.550.000	87,86
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19.800.000	17.400.000	2.400.000	87,88

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.800.000	17.400.000	2.400.000	87,88
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.400.000	15.300.000	2.100.000	87,93
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.400.000	15.300.000	2.100.000	87,93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.392.760	136.830.365	8.562.395	94,11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	714.000	714.000	-	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.190.959	74.017.365	5.173.594	93,47
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.693.801	2.059.500	634.301	76,45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.326.500	4.304.500	22.000	99,49
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	15.360.000	2.640.000	85,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.467.500	40.375.000	92.500	99,77
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	100.000.000	-	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	-	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.864.000	407.873.346	42.990.654	90,46
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000	3.025.350	224.650	93,09
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.340.000	311.991.996	20.348.004	93,88
	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Daerah	115.274.000	92.856.000	22.418.000	80,55
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.837.024	76.489.900	5.347.124	93,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.014.392	60.992.800	1.021.592	98,35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.412.632	9.72.100	2.840.532	77,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.175.000	5.925.000	250.000	95,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.235.000	-	1.235.000	42,68
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	712.453.592	640.018.565	72.435.027	89,83
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	712.453.592	640.018.565	72.435.027	89,83
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	106.072.406	54.071.565	52.000.841	50,98
	Pelayanan Informasi Publik	16.200.000	14.250.000	1.950.000	87,96
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	590.181.186	571.697.000	18.484.186	96,87
III	Program Aplikasi Informatika	270.810.000	139.200.000	131.610.000	51,40
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270.810.000	139.200.000	131.610.000	51,40

	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	109.800.000	96.300.000	13.500.000	87,70
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	161.010.000	126.343.500	34.666.500	78,47
IV	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	17.400.000	15.300.000	2.100.000	87,93
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	17.400.000	15.300.000	2.100.000	87,93
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.400.000	15.300.000	2.100.000	87,93

Tabel 3.1
Rincian Belanja Langsung
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk Tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.508.191.785,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.208.039.328,00 atau 91,44%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 300.161.457,00.

Adapun rincian Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.000,00 dengan persentase 87,86%;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.650.898.001,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.417.236.717 dengan persentase 91,19%;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.000, dengan persentase 87,86%;
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.400.000,00 dengan persentase 87,88%;
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.300.000,00 dengan persentase 87,93%;
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 145.392.760,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 136.830.365,00 dengan persentase 94,11%;

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan persentase 100%;
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 450.864.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 407.873.346,00 dengan persentase 90,46%;
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 81.837.024,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 76.489.900,00 dengan persentase 93,47%.

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran untuk Tahun 2022 Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 712.453.592,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 640.018.565,00 atau 89,83%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 72.435.027,00.

Adapun Kegiatan dari Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 712.453.592,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 640.018.565,00 dengan persentase 89,83%.

c. Program Aplikasi Informatika

Anggaran untuk Tahun 2022 Program Aplikasi Informatika sebesar Rp. 270.810.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 139.200.000,00 atau sebesar 51,40%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 131.610.000,00.

Adapun Kegiatan dari Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 270.810.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 139.200.000,00 dengan persentase 51,40%.

d. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran untuk Tahun 2022 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 17.400.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.300.000,00 atau sebesar 87,93%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 2.100.000,00.

Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.400.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.300.000,00 dengan persentase 87,93%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

3.1.2.1 Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	374.739.700	362.271.324	96,67
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	374.739.700	362.271.324	96,67
4.1.2	Retribusi Daerah	374.739.700	362.271.324	96,67
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	374.739.700	362.271.324	96,67
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.739.700	362.271.324	96,67

Tabel 3.2
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

3.1.2.2 Belanja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	4.508.855.377	4.085.992.393	90,62
5.1	BELANJA OPERASI	4.384.865.377	4.017.095.858	91,61
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.633.808.001	2.402.696.717	91,23
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.465.255.933	1.328.806.661	90,6
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.073.424.633	970.085.103	90,37
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.073.424.633	970.085.103	90,37
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	102.107.282	94.276.591	92,33
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	102.107.282	94.276.591	92,33
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	107.260.100	99.350.000	92,63
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	107.260.100	99.350.000	92,63
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.673.200	24.360.000	98,73
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.673.200	24.360.000	98,73
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.333.000	31.305.000	91,18
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.333.000	31.305.000	91,18
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	65.534.306	60.543.120	92,38
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.534.306	60.543.120	92,38

5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.668.278	3.542.017	96,56
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.668.278	3.542.017	96,56
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.441	15.021	91,36
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.441	15.021	91,36
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.520.317	38.077.130	83,65
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	45.520.317	38.077.130	83,65
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.179.566	1.813.151	83,19
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.179.566	1.813.151	83,19
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.538.810	5.439.528	83,19
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.538.810	5.439.528	83,19
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	974.390.468	910.850.056	93,48
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	791.083.006	756.574.877	95,64
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	791.083.006	756.574.877	95,64
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.779.010	9.232.739	94,41
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.779.010	9.232.739	94,41
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	173.528.452	145.042.440	83,58
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	173.528.452	145.042.440	83,58
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.700.000	113.030.000	84,54
5.1.01.03.02.	Belanja bagi - ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000	-	-
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi - ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.000.000	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	164.017.600	151.840.000	92,58

5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	161.517.600	149.340.000	92,46
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000	2.500.00	100,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.144.000	11.200.000	92,23
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.144.000	11.200.000	92,23
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.751.057.376	1.614.399.111	92,20
5.1.02.01.	Belanja Barang	131.635.876	129.530.865	98,40
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	131.635.876	129.530.865	98,40
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	868.000	860.000	71,50
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.027.024	55.840.000	97,92
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	484.000	399.200	82,48
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.675.145	18.661.665	99,93
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.769.906	5.710.500	98,97
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.820.00	2.820.00	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	714.000	714.000	100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir /Cendera Mata	22.500.000	22.500.000	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.693.801	2.059.500	76,45
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.900.000	1.888.000	99,37
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.090.000	14.990.000	99,34
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.094.000	3.088.000	99,81
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-

5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.454.970.000	1.324.605.746	91,04
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.307.920.000	1.177.555.746	90,03
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.100.000	21.900.000	68,22
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.000	100.000	100,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa - Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	200.000	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.800.000	21.500.000	61,78
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.200.000	45.900.000	87,93
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.200.000	19.500.000	87,84
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	352.800.000	293.550.000	83,21
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	439.750.000	433.900.000	98,67
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	96.600.000	85.358.711	88,36
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000	15.360.000	85,33
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	253.740.000	237.566.785	93,63
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	430.000	205.350	47,76
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000	2.714.900	54,30
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	43.050.000	43.050.000	100,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.050.000	1.050.000	100,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000	2.000.000	100,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000	30.000.000	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	104.000.000	104.000.000	100,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	100.000.000	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000	4.000.000	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	19.610.000	17.935.000	98,26

5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.575.000	17.935.000	96,55
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.500.000	11.460.000	99,65
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	900.000	550.000	61,11
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.750.000	3.675.000	98,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.425.000	2.250.000	92,78
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.035.000	-	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	1.035.000	-	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	144.841.500	142.327.500	98,28
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.841.500	142.327.500	98,28
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.936.500	83.427.500	97,08
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.905.000	43.900.000	99,99
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000	15.000.000	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	123.990.000	68.896.565	55,57
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.990.000	68.896.565	55,57
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.990.000	36.896.565	87,87
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	35.990.000	30.996.565	86,13
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35.990.000	30.996.565	86,13
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000	5.900.000	98,33
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000	5.900.000	98,33
5.2.02.06.	Belanja Modal - Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal - Alat Studio	50.000.000	-	-

5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan - Film	30.000.000	-	-
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	32.000.000	32.000.000	100.00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	32.000.000	32.000.000	100.00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	32.000.000	32.000.000	100.00
SURPLUS/(DEFISIT)		(4.134.115.677)	(3.723.721.069)	90.07

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan khusus bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian tidak berkompeten dalam hal Pembiayaan.

3.1.3. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.3.1 Rasio Belanja

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH				
Belanja Langsung	4.508.855.377,00	4.085.992.393,00	90,62	4.612.864.000,00
JUMLAH	4.508.855.377,00	4.085.992.393,00	90,62	4.612.864.000,00

Tabel 3.4
Rincian Rasio Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.2.1 Hambatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan keuangan melalui aplikasi SIPKD secara online, kendala yang dihadapi antara lain infrastruktur Jaringan Internet yang tidak selamanya bagus (sering terjadi gangguan) sehingga menjadikan pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan terlambat. Selain itu terkadang sumber daya manusia dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pelaporan keuangan.

3.2.2 Pemecahan Masalah

Untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan oleh SIPKD kedepannya, diupayakan untuk tahun anggaran berikutnya perlu penambahan anggaran untuk

memperkuat jaringan/ signal internet SIPKD. Untuk sumber daya manusianya diberikan pelatihan lagi agar lebih berkompeten dan berkualitas.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas:

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.;
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*);
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*);
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Pangandaran adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021);
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi;
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- 6) Kas:
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas;
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca;
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang:
 - Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi;
 - Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan;
 - Piutang dinilai sebesar nilai nominal;

- Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.

8) Persediaan:

- Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*;
 - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan;
 - Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.

9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

10) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan:

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut;
- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional;
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian;
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Pangandaran. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

- **Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat;**
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca;
- **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
- **Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.**
 - Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo;
 - Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak;
 - *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi:

- **Utang kepada Pemerintah**
Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- **Utang Bunga Jangka Panjang**

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

15) **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

16) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL** adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir;

17) **Laporan Operasional** yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

18) **Laporan Arus Kas** yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;

19) **Laporan Perubahan Ekuitas** yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir;

20) **Catatan atas Laporan Keuangan** yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian;
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan;
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya;
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan;
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut;
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja;

- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan;
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah;
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya);
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan;
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada satu periode akuntansi;
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran;
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset;
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pangandaran namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk

menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi;

- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran;
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan;
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran setelah periode akuntansi berjalan;
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan;
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah :

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah;

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban :

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa;
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga;
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan:

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB. V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Per 31 Desember Tahun 2022 (*unaudited*) adalah sebagai berikut, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2022, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Tahun 2022 Rp. 362.271.324,00 atau mencapai 96,67% dari Target Anggaran Rp. 374.739.700,00 bertambah jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 Rp. 350.447.622,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 4.085.992.393,00 atau mencapai 90,62% dari target anggaran sebesar Rp. 4.508.855.377,00 atau berkurang jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 4.612.864.000,00.

Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan informasi mengenai Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2022. Neraca Akhir Tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2022 ditutup dengan Jumlah Aset sebesar Rp. 3.329.154.409,01 atau turun dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.713.647.150,57. Nilai Aset sebesar Rp. 3.329.154.409,01 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 44.819.692,31 Aset Tetap sebesar Rp. 3.247.333.466,70 Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas, sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.329.154.409,01 atau mengalami penurunan dibandingkan Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.713.647.150,57.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan informasi tentang belanja operasi dan belanja modal. Dimana Anggaran Belanja per 31 Desember 2022 Rp. 4.508.855.377,00 realisasi Rp. 4.085.992.393,00.

Laporan Operasional (LO) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan berbagai unsur Beban-LO, Surplus/Defisit dari Operasi yang merupakan output dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Beban Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2022 ditutup dengan nilai sebesar Rp. 3.863.036.039,00. Terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp. 2.236.848.484,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.621.595.626,00, serta Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 4.591.929,36 adapun Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 1.429.388.565,00. Terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.335.924.377,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 28.344.925,00, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 6.307.620,00, serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

sebesar Rp. 58.811.683,00. Sehingga terdapat (surplus/defisit) dari belanja operasi senilai Rp. (4.908.061.876,36).

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan informasi penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir Tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2022 adalah Ekuitas awal yang merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021 senilai Rp. 4.505.037.105,97 penjumlahan dari Surplus/Defisit-LO Rp. (4.908.061.876,36), RK PPKD Rp. 3.723.721.069,00, serta Koreksi Kesalahan – Piutang Menara Komunikasi Rp. (38.054.537,60), sehingga diperoleh Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp. 3.282.641.761,01.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

5.2. POS-POS NERACA

1. ASET		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1. ASET LANCAR	44.819.692,31	68.820.433,87

Tabel 5.1
Pos Neraca Aset Lancar
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 44.819.692,31 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 68.820.433,87 atau mengalami penurunan. Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 44.819.692,31 terdiri dari Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp. 41.941.635,00, Penyisihan Piutang sebesar Rp. (10.035.572,22), Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 8.333.333,33 dan Persediaan sebesar Rp. 4.580.296,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1.04. PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	41.941.635,20	58.231.970,40

Tabel 5.2
Pos Neraca Piutang Retribusi Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 41.941.635,20 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 58.231.970,40. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 merupakan hasil perhitungan saldo akhir tahun per 31 Desember 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1.10. PENYISIHAN PIUTANG	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)

Tabel 5.3
Pos Neraca Penyisihan Piutang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (10.035.572,22) sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (5.443.642,86). Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (10.035.572,22) merupakan hasil perhitungan dari nilai penyisihan dikurangi beban penyisihan.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1.11. BEBAN DIBAYAR DIMUKA	8.333.333,33	8.333.333,33

Tabel 5.4
Pos Neraca Beban Dibayar Dimuka
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 8.333.333,33 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 8.333.333,33. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.333.333,33 merupakan hasil perhitungan beban sewa gedung kantor selama setahun yang nilainya sebesar Rp. 100.000.000,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.1.12. PERSEDIAAN	4.580.296	6.971.500

Tabel 5.5
Pos Neraca Persediaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.580.296,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 6.971.500,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.580.296,00 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Per 31 Desember 2022, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA BAHAN-BAHAN	390.000	57.099.200	57.489.200	-
2.	BELANJA SUKU CADANG	-	-	-	-

3.	BELANJA ALAT KANTOR	6.441.500	52.465.665	54.326.869	4.580.296
4.	BELANJA OBAT	-	-	-	-
5.	BELANJA DISERAHKAN	-	-	-	-
6.	BELANJA STRATEGIS	-	-	-	-
7.	BELANJA NATURA DAN PAKAN	140.000	1.888.000	2.028.000	-
8.	BELANJA PERSEDIAAN PENELITIAN	-	-	-	-
9.	BELANJA PERSEDIAAN DALAM PROSES	-	-	-	-
10.	BELANJA MAMIN	-	18.078.000	18.078.000	-
11.	BELANJA PAKAIAN	-	-	-	-
	Jumlah Persediaan	6.971.500	129.530.865	131.922.069	4.580.296

Tabel 5.6
Pos Neraca Rincian Persediaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

ASET		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.3. ASET TETAP	3.247.333.466,70	4.549.013.783,70

Tabel 5.7
Pos Neraca Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.247.333.466,70 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.549.013.783,70. Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 terdiri dari:

NO	URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022 (UN-AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Peralatan dan Mesin	6.661.234.742,70	68.896.565,00	-	6.730.131.307,70
2	Gedung dan Bangunan	1.133.797.000,00	-	-	1.133.797.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.228.600,00	-	-	189.228.600,00
4	Aset Tetap Lainnya	117.025.000,00	-	-	117.025.000,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	8.101.285.342,70	68.896.565,00	-	8.170.181.907,70

Tabel 5.7
Rincian Neraca Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	6.730.131.307,70	4.549.013.783,70

Tabel 5.8
Rincian Neraca Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.730.131.307,70 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.549.013.783,70 ada penambahan atau pengurangan aset.

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.133.797.000	1.133.797.000

Tabel 5.9
Rincian Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.133.797.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.133.797.000,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.3.04.	Jalan Irigasi dan Jaringan	189.228.600	189.228.600

Tabel 5.10
Rincian Neraca Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 189.228.600,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 189.228.600,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	117.025.000	117.025.000

Tabel 5.11
Rincian Neraca Aset Tetap Lainnya
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 117.025.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 117.025.000,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(4.922.848.441)	(3.552.271.559)

Tabel 5.12
Rincian Neraca Aset Tetap Akumulasi Penyusutan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (4.922.848.441,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (3.552.271.559,00). Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap menetapkan bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.

NO	URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2021 (UN-AUDITED)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	-	-	758.851.426,00
	Jumlah	758.851.426,00	-	-	758.851.426,00

Tabel 5.13
Pos Neraca Aset Lainnya
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset lainnya yang terjadi selama kurun waktu dari 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.5.3.05.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	758.851.426	758.851.426

Tabel 5.14

Rincian Neraca Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 758.851.426,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 758.851.426,00 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.5.3.06.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(721.850.176)	(663.038.493)

Tabel 5.15

Rincian Neraca Aset Lainnya Akumulasi Amortisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (721.850.176,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (663.038.493,00).

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
2. KEWAJIBAN	46.512.648,00	208.610.044,60

Tabel 5.16

Pos Neraca Kewajiban
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 46.512.648,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 208.610.044,60.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
2.1. Kewajiban Jangka Pendek	46.512.648,00	208.610.044,60

Tabel 5.17

Pos Neraca Kewajiban Jangka Pendek
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 46.512.648,00 sedangkan saldo per per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 208.610.044,60. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 46.512.648,00 merupakan bagian Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp. 317.292,00, Utang Belanja sebesar Rp. 46.195.356,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Utang Belanja Listrik sebesar Rp. 8.220.138,00, Utang Belanja Kawat Faksimili/Telpon/Internet sebesar Rp. 4.748.140,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3. EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97

Tabel 5.18
Pos Neraca Ekuitas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.282.641.761,01 sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.505.037.105,97. Saldo Ekuitas 2022 sebesar Rp. 3.282.641.761,01 merupakan hasil perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 dari Laporan Perubahan Ekuitas yang merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal Tahun 2022 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2021 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan, RK PPKD, RK Mutasi Masuk dan Koreksi Kesalahan – Piutang Menara Komunikasi.

5.3. POS-POS LRA

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrua pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4.	Pendapatan Daerah	374.739.700	362.271.324	96,67	350.447.622
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	374.739.700	362.271.324	96,67	350.447.622
5.	Belanja Daerah	4.508.855.377	4.085.992.393	90,62	4.612.864.000
5.1	Belanja Operasi	4.384.865.377	4.017.095.828	91,61	3.633.236.500
5.2	Belanja Modal	123.990.000	68.896.565	55,57	979.627.500
	Surplus/Defisit	(4.134.115.677)	(3.723.721.069)	90,07	(4.262.416.378)

Tabel 5.19
Pos Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

5.4. POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan - LO

Realisasi Pendapatan Daerah – LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 384.362.728,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 354.721.074,40 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 29.641.653,60 atau 8,36%.

5.4.2. Beban Daerah

Realisasi Beban Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.292.424.604,36. Sedangkan realisasi Beban Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.366.422.467,54 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (73.997.863,18) atau 1,38%.

5.5.3. Surplus/Defisit - LO

Realisasi Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (4.908.061.876,36). Sedangkan Realisasi Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (5.011.701.393,14) mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. (103.639.516,78) atau 2,07%.

5.5. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian per 31 Desember 2022 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 3.282.641.761,01.

5.5.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2021 yang memiliki nilai Rp. 4.505.037.105,97.

5.5.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan perhitungan dari realisasi Pendapatan Daerah-LO sebesar Rp. 384.362.728,00 dikurangi Beban Daerah sebesar Rp. 5.292.424.604,36 sama dengan Rp. (4.908.061.876,36).

5.5.3. RK PPKD

RK PPKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.723.721.069,00 merupakan perhitungan dari realisasi belanja daerah sebesar Rp. 4.085.992.393,00 dikurangi jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 362.271.324,00.

5.5.4. KOREKSI KESALAHAN – PIUTANG MENARA KOMUNIKASI

Koreksi Kesalahan – Piutang Menara Komunikasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (38.054.537,60) merupakan akumulasi piutang retribusi Menara Telekomunikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditambah denda sebagaimana data terlampir.

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	4,505,037,105.97	4,505,037,105.97
Surplus/Defisit – LO	(4,908,061,876.36)	0,00
RK PPKD	3,723,721,069.00	0,00
Koreksi Kesalahan - Piutang Menara Komunikasi	(38,054,537.60)	0,00
Estimasi Perubahan SAL	0,00	0,00
Surplus/Defisit-LRA	0,00	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	3,282,641,761.01	4,505,037,105.97

Tabel 5.20
Pos Laporan Perubahan Ekuitas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2022

BAB. VI**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja sebagai berikut :

Kedudukan Dinas merupakan wilayah kerja Dinas sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Kepala Dinas untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana kerja;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan indikator kinerja utama;
- d. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis;
- e. Memverifikasi rencana Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
- f. Mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek: Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan, dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam Pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pejabat Struktural, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub. Bagian

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Susunan Organisasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian;
- d. Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- e. Plt. Kasi Statistik Sektoral;
- f. Substansi Informasi dan Komunikasi Publik;
- g. Substansi Aplikasi Informatika;
- h. Kasubag Program dan Keuangan;
- i. Plt Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Data Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Per 31 Desember 2020 yaitu :

- PNS sebanyak 23 Orang;
- Non PNS sebanyak 20 Oarang.

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
Data PNS			
1	Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Drs, Sarno, MT	Pembina Utama Muda, IV/c	Perekayasa Ahli Madya
3	Ade Kuswaya, ST., MM	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4	Benny, S.Sos	Pembina, IV/a	Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian
5	Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd	Pembina Tk. I, IV/b	Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
6	Idayat Ruslan, S.Sn	Penata TK.I, III/d	Substansi Informasi dan Komunikasi Publik
7	Marlia Herlia, S.IP	Penata, III/c	Kasubag Program dan Keuangan
8	Thoyib Wahyudin, S.Kom	Penata, III/c	Substansi Aplikasi Informatika
9	Iqbal Aditya Pangestu, S.Kom	Penata Muda, III/a	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Yogi Sullstia, S.Kom	Penata Muda, III/a	Plt. Kasi Statistik Sektoral
11	Danil Fathurrohman, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pelaksana
12	Adi Bangbang Aruman, S.Tr.Kom	Penata Muda, III/a	Pelaksana
13	Yanuar Dwi Jatmiko Wismoaji, S.T	Penata Muda, III/a	Pelaksana
14	Ami Gatra Yudhono, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pelaksana
15	Reza Imam Malik, S.Si	Penata Muda, III/a	Pelaksana
16	Suciati Intan Henidar, S.Ds	Penata Muda, III/a	Pelaksana
17	Adam Kusumah Firdaus, S.T	Penata Muda, III/a	Pelaksana
18	Satria Hanafie, S.T	Penata Muda, III/a	Pelaksana

19	Muhammad Rifki Prathama Ubaidillah, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pelaksana
20	Shabrina Larasati R, A.Md	Pengatur, II/c	Pelaksana
21	Ridla Kusuma	Pengatur, II/c	Pelaksana
22	Nandito Tri Septian, A.Md	Pengatur, II/c	Pelaksana
23	Enok Saripah	Pengatur Muda, II/a	Pelaksana
Data Non PNS			
1	Adi Bagus Hartanto	Non PNS	Tenaga Keamanan
2	Al Kartini	Non PNS	Operator PLID
3	Angga Permana	Non PNS	Operator Command Center
4	Dika Setia Pratama	Non PNS	Operator Command Center
5	Dinar Nuryani	Non PNS	Operator BMD
6	Herni Asmaa Muthmalnah	Non PNS	Operator Keuangan
7	Heru Purnomo Aji	Non PNS	Operator Command Center
8	Indira Zamalina Suci Caesari	Non PNS	Operator Pendapatan
9	Iqbal Muhammad Fajar N.	Non PNS	Programmer
10	Jatnika Firmansyah	Non PNS	Tenaga Keamanan
11	Moch Taufik Ramdhany	Non PNS	Tenaga Keamanan
12	Nadya Oktavia Wulandari	Non PNS	Tenaga Runner/Peliput
13	Parsim	Non PNS	Tenaga Kebersihan
14	Restu Galih	Non PNS	Supir/Pengemudi
15	Rety Aprissa Dewi	Non PNS	Operator Persandian
16	Syaeful Malik	Non PNS	Programmer
17	Tesya Sri Septiani	Non PNS	Operator Perencanaan
18	Wida Ayuditha	Non PNS	Operator BMD
19	Yana Herdiana	Non PNS	Programmer
20	Moch. Nurholis Majid	Non PNS	Operator Command Center

Tabel 6.1

Daftar Pegawai PNS dan Non PNS
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2022

BAB. VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2022 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN


JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720106 199803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SKPD : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

1 - 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	374.739.700,00	362.271.324,00	96,67	350.447.622,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	374.739.700,00	362.271.324,00	96,67	350.447.622,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	374.739.700,00	362.271.324,00	96,67	350.447.622,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	374.739.700,00	362.271.324,00	96,67	350.447.622,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.739.700,00	362.271.324,00	96,67	350.447.622,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.739.700,00	362.271.324,00	96,67	350.447.622,00
5.	BELANJA DAERAH	4.508.955.377,00	4.085.992.393,00	90,62	4.612.864.030,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.394.995.377,00	4.017.995.826,00	91,61	3.633.236.590,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.633.806.001,00	2.402.696.717,00	91,23	1.521.997.374,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.485.255.933,00	1.328.806.661,00	90,00	1.153.157.326,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.073.424.633,00	970.085.103,00	90,37	859.941.419,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.073.424.633,00	970.085.103,00	90,37	859.941.419,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	102.107.282,00	94.276.591,00	92,33	90.661.816,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	102.107.282,00	94.276.591,00	92,33	90.661.816,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	197.260.100,00	99.350.000,00	92,63	105.290.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	197.260.100,00	99.350.000,00	92,63	105.290.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.673.200,00	24.360.000,00	98,73	21.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.673.200,00	24.360.000,00	98,73	21.660.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.333.000,00	31.305.000,00	91,18	21.415.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.333.000,00	31.305.000,00	91,18	21.415.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	65.534.306,00	60.543.120,00	92,38	53.735.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.534.306,00	60.543.120,00	92,38	53.735.640,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.668.278,00	3.542.017,00	96,56	3.439.733,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.668.278,00	3.542.017,00	96,56	3.439.733,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.441,00	15.021,00	91,36	13.718,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.441,00	15.021,00	91,36	13.718,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.520.317,00	38.077.130,00	83,65	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	45.520.317,00	38.077.130,00	83,65	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.179.566,00	1.813.151,00	83,19	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.179.566,00	1.813.151,00	83,19	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.538.810,00	5.439.528,00	83,19	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.538.810,00	5.439.528,00	83,19	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	974.390.468,00	919.856.056,00	93,48	655.810.048,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	791.083.006,00	756.574.877,00	95,64	655.810.048,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	791.083.006,00	756.574.877,00	95,64	655.810.048,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.779.010,00	9.232.739,00	94,41	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.779.010,00	9.232.739,00	94,41	-
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	173.528.452,00	145.042.440,00	83,58	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	173.528.452,00	145.042.440,00	83,58	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	194.191.690,00	163.040.000,00	83,97	113.030.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	164.017.690,00	151.840.000,00	92,58	105.830.000,00

Permendagri 77

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	161.517.000,00	148.340.000,00	92,46	98.330.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	3.500.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-	4.000.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.144.000,00	11.200.000,00	92,23	7.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.144.000,00	11.200.000,00	92,23	7.200.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.751.057.376,00	1.614.399.111,00	92,19	1.711.239.126,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	131.635.876,00	129.530.865,00	98,40	134.780.090,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	131.635.876,00	129.530.865,00	98,40	134.780.090,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	868.000,00	860.000,00	99,08	3.753.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.027.024,00	55.840.000,00	97,92	54.714.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	484.000,00	389.200,00	80,43	1.202.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	13.094.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.675.145,00	18.661.665,00	99,93	26.290.360,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.759.906,00	5.710.500,00	99,17	5.748.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	714.000,00	714.000,00	100,00	685.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.693.801,00	2.059.500,00	76,45	2.965.700,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.900.000,00	1.888.000,00	99,37	1.312.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.090.000,00	14.990.000,00	99,34	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.094.000,00	3.088.000,00	99,81	1.524.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Paketan Olahraga	-	-	-	13.000.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.454.970.000,00	1.324.805.746,00	91,04	1.488.873.860,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.307.920.000,00	1.177.555.746,00	90,03	1.386.873.860,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemba, Acara, dan Panitia	32.100.000,00	21.900.000,00	68,22	32.340.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	100,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Reharian	-	-	-	500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Pasaran dan Sarana Umum	200.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.800.000,00	21.500.000,00	61,78	34.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.200.000,00	45.900.000,00	87,93	52.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	22.200.000,00	19.500.000,00	87,84	22.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	352.800.000,00	293.550.000,00	83,21	334.200.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-	8.360.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	439.750.000,00	433.900.000,00	98,67	632.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	86.600.000,00	85.358.711,00	98,56	78.573.953,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnas/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	15.360.000,00	85,33	15.360.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertangan	253.740.000,00	237.566.785,00	93,63	168.067.007,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	430.000,00	205.350,00	47,76	638.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	2.714.900,00	54,30	3.424.400,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	43.050.000,00	43.050.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.050.000,00	11.050.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	104.000.000,00	104.000.000,00	100,00	104.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	19.616.000,00	17.935.000,00	91,46	8.611.560,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.575.000,00	17.935.000,00	96,55	8.611.560,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.500.000,00	11.480.000,00	99,65	6.786.560,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	900.000,00	550.000,00	61,11	150.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.750.000,00	3.675.000,00	98,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.425.000,00	2.250.000,00	92,78	1.875.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.036.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.036.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	144.841.500,00	142.327.500,00	98,26	76.973.646,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	144.841.500,00	142.327.500,00	98,26	76.973.646,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.036.500,00	83.427.500,00	97,08	48.017.646,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.905.000,00	43.900.000,00	99,98	18.956.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	123.990.000,00	68.896.565,00	55,67	979.627.500,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.990.000,00	68.896.565,00	55,67	979.027.500,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.990.000,00	36.896.565,00	87,87	33.800.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	35.990.000,00	30.896.565,00	86,13	-
5.2.02.05.01.0006	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35.990.000,00	30.896.565,00	86,13	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33	33.800.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	33.800.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	56.000.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	-	-	-
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	939.427.500,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	148.500.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	-	-	-	148.500.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	790.927.500,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	-	-	-	459.800.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	332.327.500,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	6.600.000,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	6.600.000,00
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	-	-	-	6.600.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	-	-	-	6.600.000,00
	SURPLUS(DEPOSIT)	(4.134.115.677,00)	(3.723.721.968,00)	90,07	(4.262.416.376,00)

Parigi, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

JAJA NURUHUDA ST., M.Dev.Plg

197201061899031002

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Halaman 1 dari 4

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1.	ASET	3.329.154.409,01	4.713.647.150,57
1.1.	ASET LANCAR	44.819.692,31	68.820.433,87
1.1.01.	Kas dan Setara Kas	0	727.273,66
1.1.01.01.	Kas Lainnya	0	727.273,66
1.1.01.01.0001.	Kas Lainnya	0	727.273,66
1.1.04.	Piutang Retribusi Daerah	41.941.635,20	58.231.970,40
1.1.04.01.	Piutang Retribusi Jasa Umum	41.941.635,20	58.231.970,40
1.1.04.01.13.0001.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	41.941.635,20	58.231.970,40
1.1.16.	Penyisihan Piutang	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)
1.1.16.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)
1.1.16.01.01.0001.	Penyisihan Piutang Retribusi	(10.035.572,22)	(5.443.642,86)
1.1.11.	Beban Dibayar Dimuka	8.333.333,33	8.333.333,33
1.1.11.01.	Beban Dibayar Dimuka	8.333.333,33	8.333.333,33
1.1.11.01.01.0001.	Beban Dibayar Dimuka	8.333.333,33	8.333.333,33
1.1.12.	Persediaan	4.580.296,00	6.971.500,00
1.1.12.01.	Barang Pakai Habis	4.580.296,00	6.971.500,00
1.1.12.01.01.0002.	Bahan Kimia	0	390.000,00
1.1.12.01.01.0003.	Alat Tulis Kantor	4.197.296,00	4.627.600,00
1.1.12.01.01.0003.	Bahan Cetak	0	1.390.000,00
1.1.12.01.01.0004.	Benda Pos	0	80.000,00
1.1.12.01.01.0013.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	383.000,00	344.500,00
1.1.12.01.07.0001.	Habis	0	140.000,00
1.2.	ASET TETAP	3.247.333.466,70	4.549.013.783,79
1.2.02.	Peralatan dan Mesin	6.730.131.307,70	6.061.234.742,70
1.2.02.03.	Alat Angkutan	561.407.317,70	561.407.317,70
1.2.02.03.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang	526.801.236,70	526.801.236,70
1.2.02.03.01.0004.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.606.081,00	32.606.081,00
1.2.02.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000,00	6.050.000,00
1.2.02.03.03.0001.	Alat Ukur Universal	6.050.000,00	6.050.000,00
1.2.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	854.277.536,00	817.380.971,00
1.2.02.05.01.0004.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	38.238.930,00	38.238.930,00
1.2.02.05.01.0005.	Alat Kantor Lainnya	54.786.565,00	23.790.000,00
1.2.02.05.07.0001.	Mebel	285.423.130,00	285.423.130,00
1.2.02.05.01.0004.	Alat Pendingin	341.199.950,00	335.299.950,00
1.2.02.05.01.0005.	Alat Dapur	510.000,00	510.000,00
1.2.02.05.01.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.385.259,00	55.385.259,00
1.2.02.05.01.0007.	Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.02.05.03.0001.	Meja Kerja Pejabat	10.375.926,00	10.375.926,00
1.2.02.05.03.0002.	Meja Rapat Pejabat	19.809.000,00	19.809.000,00
1.2.02.05.03.0003.	Kursi Kerja Pejabat	28.678.774,00	28.678.774,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1.3.02.05.03.0007.	Lemari dan Anjo Pejabat	18.870.000,00	18.870.000,00
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.662.442.872,00	2.662.442.872,00
1.3.02.06.01.0001.	Peralatan Studio Audio	2.108.191.267,00	2.108.191.267,00
1.3.02.06.01.0002.	Peralatan Studio Video dan Film	31.786.000,00	31.786.000,00
1.3.02.06.01.0006.	Alat Studio Lainnya	94.941.000,00	94.941.000,00
1.3.02.06.02.0001.	Alat Komunikasi Telephone	51.307.359,00	51.307.359,00
1.3.02.06.03.0003.	Peralatan Pemancar VHF/PM	3.850.000,00	3.850.000,00
1.3.02.06.03.0019.	Switcher Antena	34.667.600,00	34.667.600,00
1.3.02.06.03.0020.	Switcher/Merana Antena	117.474.000,00	117.474.000,00
1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga	20.225.646,00	20.225.646,00
1.3.02.08.	Alat Laboratorium	286.634.918,00	286.634.918,00
1.3.02.08.01.0013.	Alat Laboratorium Kimia	52.652.000,00	52.652.000,00
1.3.02.08.01.0015.	Alat Laboratorium Immunologi	130.362.918,00	130.362.918,00
1.3.02.08.02.0006.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Atas	89.320.000,00	89.320.000,00
1.3.02.08.06.0006.	Peralatan Umami	14.300.000,00	14.300.000,00
1.3.02.09.	Alat Pertenjataan	21.882.519,00	21.882.519,00
1.3.02.09.04.0004.	Peralatan Deteksi Intel	14.635.000,00	14.635.000,00
1.3.02.09.04.0007.	Alas Fotografi Kepolisian	4.097.519,00	4.097.519,00
1.3.02.09.04.0008.	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	3.150.000,00	3.150.000,00
1.3.02.10.	Komputer	2.337.436.145,00	2.305.436.145,00
1.3.02.10.01.0007.	Komputer Jaringan	86.448.112,00	86.448.112,00
1.3.02.10.01.0009.	Personal Computer	416.411.636,00	416.411.636,00
1.3.02.10.01.0003.	Komputer Unit Lainnya	32.000.000,00	0
1.3.02.10.01.0003.	Peralatan Mini Computer	34.097.000,00	34.097.000,00
1.3.02.10.01.0004.	Peralatan Personal Computer	856.978.462,00	856.978.462,00
1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan	911.500.935,00	911.500.935,00
1.3.05.	Gedung dan Bangunan	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.03.01.	Bangunan Gedung	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Triase	189.228.600,00	189.228.600,00
1.3.04.04.	Jaringan	189.228.600,00	189.228.600,00
1.3.04.04.02.0002.	Jaringan Distribusi	19.228.600,00	19.228.600,00
1.3.04.04.02.0002.	Jaringan Listrik Lainnya	170.000.000,00	170.000.000,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	117.025.000,00	117.025.000,00
1.3.05.01.	Bahan Perustakaan	41.650.000,00	41.650.000,00
1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	41.650.000,00	41.650.000,00
1.3.05.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	75.375.000,00	75.375.000,00
1.3.05.07.01.0001.	Aset Tetap Dalam Renovasi	75.375.000,00	75.375.000,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(4.972.848.441,00)	(3.332.271.559,00)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.815.078.001,00)	(3.479.153.754,00)
1.3.07.01.01.0029.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(161.867.648,00)	(161.867.648,00)
1.3.07.01.02.0029.	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(3.610.248.933,00)	(2.474.324.596,00)
1.3.07.01.03.0047.	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(20.350.000,00)	(20.350.000,00)
1.3.07.01.04.0018.	Akumulasi Penyusutan alat kantor	(46.402.881,00)	(46.402.881,00)
1.3.07.01.04.0020.	Akumulasi Penyusutan alat rumah tangga	(100.162.117,00)	(100.162.117,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
1.3.07.01.05.0001.	Akumulasi Penyusutan Meja dan kursi kerja/rapet pejabat	(37.313.651,00)	(37.313.651,00)
1.3.07.01.06.0001.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-	(55.792.730,00)	(55.792.730,00)
1.3.07.01.06.0002.	Akumulasi Penyusutan Alat studio	(129.928.972,00)	(129.928.972,00)
1.3.07.01.06.0004.	Akumulasi penyusutan alat komunikasi	(21.513.056,00)	(21.513.056,00)
1.3.07.01.06.141.	Akumulasi Penyusutan unit-unit laboratorium	(55.080.667,00)	(55.080.667,00)
1.3.07.01.10.0005.	Akumulasi penyusutan peralatan komputer	(367.986.387,00)	(367.986.387,00)
1.3.07.01.15.0001.	Akumulasi penyusutan alat keamanan dan perlindungan	(6.258.333,00)	(6.258.333,00)
1.3.07.01.16.0004.	Akumulasi penyusutan Alat pasca/pretek adalah	(2.172.716,00)	(2.172.716,00)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(87.396.852,00)	(58.051.927,00)
1.3.07.02.01.0001.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(28.344.925,00)	(28.344.925,00)
1.3.07.02.01.0002.	Akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja	(59.051.927,00)	(30.707.002,00)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(20.373.498,00)	(14.065.878,00)
1.3.07.03.01.0006.	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan saluran	(18.450.637,00)	(12.143.017,00)
1.3.07.03.04.0010.	Akumulasi penyusutan Jaringan Listrik	(1.922.861,00)	(1.922.861,00)
1.5.	ASET LAINNYA	37.001.250,00	95.812.933,00
1.5.01.	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00
1.5.01.01.	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00
1.5.01.01.01.0005.	Software	642.816.426,00	642.816.426,00
1.5.01.01.01.0006.	Kejutan	116.035.000,00	116.035.000,00
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(721.850.176,00)	(663.038.493,00)
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(721.850.176,00)	(663.038.493,00)
1.5.05.01.01.0004.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(721.850.176,00)	(663.038.493,00)
	JUMLAH ASET	3.329.154.409,01	4.713.647.150,57
2.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.512.648,00	208.610.044,60
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46.512.648,00	208.610.044,60
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	727.273,00
2.1.01.00.	Utang PPN Pusat	0	727.273,00
2.1.01.00.01.0001.	Utang PPN Pusat	0	727.273,00
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	317.292,00	644.493,60
2.1.05.02.	Utang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak	317.292,00	644.493,60
2.1.05.02.01.0002.	III Pendapatan diterima di muka	317.292,00	644.493,60
2.1.06.	Utang Belanja	46.195.356,00	207.238.278,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	33.227.078,00	199.075.311,00
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	27.107.078,00	38.617.441,00
2.1.06.01.01.0006.	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0	350.000,00
2.1.06.01.01.0011.	Utang Belanja Tunjangan Bertas ASN-Tunjangan Bertas PNS	0	144.040,00
2.1.06.01.01.0013.	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0	138,00
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0	123.142.892,00
2.1.06.01.03.0001.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.320.000,00	34.410.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2022	2021
1	2	3	4
2.1.06.01.03.0005.	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelola BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	800.000,00	2.400.000,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.968.278,00	8.162.967,00
2.1.06.02.02.0001.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.220.136,00	7.206.967,00
2.1.06.02.02.0003.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.748.140,00	954.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	45.512.648,00	208.618.044,60
3.	EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97
3.1.	EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97
3.1.01.	Ekuitas	(403.024.779,39)	4.505.037.105,97
3.1.01.01.	Ekuitas	4.505.037.105,97	4.505.037.105,97
3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	4.505.037.105,97	4.505.037.105,97
3.1.01.02.	Surplus/Defisit-LD	(4.908.061.876,36)	0
3.1.01.02.01.0001.	Surplus/Defisit-LD	(4.908.061.876,36)	0
3.1.01.	RK PPKD	3.723.721.069,00	0
3.1.01.01.	RK PPKD	3.723.721.069,00	0
3.1.01.01.01.0001.	RK PPKD	3.723.721.069,00	0
3.1.01.	Dampak kumulatif/Koreksi kesalahan	(38.054.537,60)	0
3.1.01.01.	Dampak kumulatif perubahan mendasar	(38.054.537,60)	0
3.1.01.01.02.0001.	Koreksi Kesalahan - Ruang Merana Telekomunikasi	(38.054.537,60)	0
3.2	JUMLAH EKUITAS	3.282.641.761,01	4.505.037.105,97
3.22	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.328.154.408,01	4.713.647.150,57

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


 JAH NUJULHUDA, ST., M.Dev.Plg
 NIP. 197201061998031002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam rupiah)

REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.1.2	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
7.2	JUMLAH PENDAPATAN	384.362.728,00	354.721.074,40	29.641.653,60	8,36
8.	BEBAN DAERAH	5.292.424.604,36	5.366.422.467,54	(73.997.863,18)	(1,38)
8.1.	BEBAN OPERASI	3.863.036.039,36	3.932.818.978,54	(69.782.939,18)	(1,77)
8.1.01.	Beban Pegawai	2.236.848.484,00	2.121.872.685,00	115.775.799,00	5,46
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.311.791.320,00	1.192.279.745,00	119.511.575,00	10,02
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	953.574.740,00	896.063.838,00	57.510.902,00	6,42
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	953.574.740,00	896.063.838,00	57.510.902,00	6,42
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	94.276.591,00	90.661.816,00	3.614.775,00	3,99
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	94.276.591,00	90.661.816,00	3.614.775,00	3,99
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	99.350.000,00	105.290.000,00	(5.940.000,00)	(5,64)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	99.350.000,00	105.290.000,00	(5.940.000,00)	(5,64)
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	24.360.000,00	21.660.000,00	2.700.000,00	12,47
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.360.000,00	21.660.000,00	2.700.000,00	12,47
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.945.000,00	21.415.000,00	9.530.000,00	44,50
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.945.000,00	21.415.000,00	9.530.000,00	44,50
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	60.398.280,00	53.735.640,00	6.662.640,00	12,40
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	60.398.280,00	53.735.640,00	6.662.640,00	12,40
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.542.017,00	3.439.733,00	102.284,00	2,97
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.542.017,00	3.439.733,00	102.284,00	2,97
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	14.883,00	13.718,00	1.165,00	8,49
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.883,00	13.718,00	1.165,00	8,49
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.077.130,00	0,00	38.077.130,00	100,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.077.130,00	0,00	38.077.130,00	100,00
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.813.151,00	0,00	1.813.151,00	100,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.813.151,00	0,00	1.813.151,00	100,00

REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.439.528,00	0,00	5.439.528,00	100,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.439.528,00	0,00	5.439.528,00	100,00
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	787.707.164,00	778.952.940,00	8.754.224,00	1,12
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	633.431.985,00	778.952.940,00	(145.520.955,00)	(18,68)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	633.431.985,00	778.952.940,00	(145.520.955,00)	(18,68)
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.232.739,00	0,00	9.232.739,00	100,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.232.739,00	0,00	9.232.739,00	100,00
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	145.042.440,00	0,00	145.042.440,00	100,00
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	145.042.440,00	0,00	145.042.440,00	100,00
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	137.350.000,00	149.840.000,00	(12.490.000,00)	(8,34)
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	127.750.000,00	140.240.000,00	(12.490.000,00)	(8,91)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium	125.250.000,00	132.740.000,00	(7.490.000,00)	(5,99)
8.1.01.03.07.0002	Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPRJ)	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.621.595.626,00	1.705.692.902,67	(84.097.276,67)	(4,93)
8.1.02.01.	Beban Barang	131.922.069,00	151.148.810,00	(19.226.741,00)	(12,72)
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	131.922.069,00	151.148.810,00	(19.226.741,00)	(12,72)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.250.000,00	3.363.500,00	(2.113.500,00)	(62,84)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.840.000,00	54.714.000,00	1.126.000,00	2,06
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	399.200,00	1.202.000,00	(802.800,00)	(60,79)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	13.094.000,00	(13.094.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.091.369,00	37.619.110,00	(18.527.741,00)	(49,75)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.100.500,00	9.875.000,00	(2.774.500,00)	(28,10)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.900.000,00	2.920.000,00	(20.000,00)	(0,68)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	714.000,00	1.081.000,00	(367.000,00)	(33,95)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sinyalir/Candera Mata	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.021.000,00	2.728.700,00	(707.700,00)	(25,94)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	1.355.000,00	(1.355.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.028.000,00	1.172.000,00	856.000,00	73,04
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	14.990.000,00	7.500.000,00	7.490.000,00	99,87
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.088.000,00	1.524.500,00	1.563.500,00	102,56

REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	0,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.329.411.057,00	1.468.958.886,67	(139.547.829,67)	(9,50)
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.182.361.057,00	1.366.792.220,00	(184.431.163,00)	(13,49)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.900.000,00	32.340.000,00	(10.440.000,00)	(32,28)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	100.000,00	4.200.000,00	(4.100.000,00)	(97,62)
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	21.500.000,00	34.800.000,00	(13.300.000,00)	(38,22)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	45.900.000,00	52.200.000,00	(6.300.000,00)	(12,07)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	19.500.000,00	22.200.000,00	(2.700.000,00)	(12,16)
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	293.550.000,00	334.200.000,00	(40.650.000,00)	(12,16)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	433.900.000,00	632.000.000,00	(198.100.000,00)	(31,34)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	86.369.882,00	78.856.613,00	7.513.269,00	9,53
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	241.360.925,00	156.062.707,00	85.298.218,00	54,66
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	205.350,00	638.500,00	(433.150,00)	(67,84)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.714.900,00	3.434.400,00	(719.500,00)	(20,95)
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	43.050.000,00	0,00	43.050.000,00	100,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00	100,00
8.1.02.02.04.132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
8.1.02.02.04.133.	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	104.000.000,00	102.166.666,67	1.833.333,33	1,79
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	98.166.666,67	1.833.333,33	1,87
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	17.935.000,00	8.611.560,00	9.323.440,00	108,27
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.935.000,00	8.611.560,00	9.323.440,00	108,27
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.460.000,00	6.786.560,00	4.673.440,00	68,86
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	550.000,00	150.000,00	400.000,00	266,67
8.1.02.03.02.121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	100,00
8.1.02.03.02.405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.250.000,00	1.675.000,00	575.000,00	34,33
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	142.327.500,00	76.973.646,00	65.353.854,00	84,90
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.327.500,00	76.973.646,00	65.353.854,00	84,90

REKENING	URAIAN	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	83.427.500,00	48.017.646,00	35.409.854,00	73,74
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.900.000,00	18.956.000,00	24.944.000,00	131,59
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	4.591.929,36	0,00	4.591.929,36	100,00
8.1.07.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.591.929,36	0,00	4.591.929,36	100,00
8.1.07.02.01.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	4.591.929,36	0,00	4.591.929,36	100,00
8.1.07.02.01.0014	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	4.591.929,36	0,00	4.591.929,36	100,00
8.1.08.	Beban Lain-lain	0,00	106.053.390,87	(106.053.390,87)	(100,00)
8.1.08.01.	Beban Lain-lain	0,00	106.053.390,87	(106.053.390,87)	(100,00)
8.1.08.01.01.	Beban Lain-lain	0,00	106.053.390,87	(106.053.390,87)	(100,00)
8.1.08.01.01.0001	Beban Lain-lain	0,00	106.053.390,87	(106.053.390,87)	(100,00)
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.429.388.565,00	1.433.620.489,00	(4.231.924,00)	(0,29)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.335.924.337,00	1.336.547.744,00	(623.407,00)	(0,05)
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	1.335.924.337,00	1.336.547.744,00	(623.407,00)	(0,05)
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	1.335.924.337,00	1.336.547.744,00	(623.407,00)	(0,05)
8.2.01.01.01.0013	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.335.924.337,00	1.336.547.744,00	(623.407,00)	(0,05)
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.307.620,00	6.307.620,00	0,00	0,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	6.307.620,00	6.307.620,00	0,00	0,00
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	6.307.620,00	6.307.620,00	0,00	0,00
8.2.03.01.01.0011	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.307.620,00	6.307.620,00	0,00	0,00
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.811.683,00	62.403.200,00	(3.591.517,00)	(5,76)
8.2.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.811.683,00	62.403.200,00	(3.591.517,00)	(5,76)
8.2.06.01.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.811.683,00	62.403.200,00	(3.591.517,00)	(5,76)
8.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	58.811.683,00	62.403.200,00	(3.591.517,00)	(5,76)
8.2	JUMLAH BEBAN	5.292.424.604,36	5.366.422.467,54	(73.997.863,18)	(1,38)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(4.908.061.876,36)	(5.011.701.393,14)	103.639.516,78	(2,07)

Parigi, 31 Desember 2022
Pengguna Anggaran


JAJA NURU HUDA, ST., M.Dev.Plg
NIP. NIP. 197201061998031002

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	4,505,037,105.97	4,505,037,105.97
Surplus/Defisit-LO	(4,908,061,876.36)	0.00
RK PPKD	3,723,721,069.00	0.00
Koreksi Kesalahan - Piutang Menara Telekomunikasi	(38,054,537.60)	0.00
Estimasi Perubahan SAL	0.00	0.00
Surplus/Defisit-LRA	0.00	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	3,282,641,761.01	4,505,037,105.97

NO.	URAIAN	TAHUN SKRD	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021	
				POKOK	DENDA
				RI	RI
01.	(2)				
1	TBG	2020	8.180.040,00	8.180.040,00	-
2	INDOSAT	2020	8.031.312,80	7.595.044,00	435.258,00
3	GIHON	-	-	-	-
4	NARAGITA	2019	17.014.483,20	16.360.080,00	654.403,20
5	HUTCHISON	2019	5.671.494,40	5.453.360,00	218.134,40
6	CENTRATAMA	-	-	-	-
7	AJN	-	-	-	-
8	XL	2020	5.344.292,80	5.344.292,80	-
9	EDOTCO	-	-	-	-
10	GAMETRACO	-	-	-	-
11	PROTELUNDO	2019	2.577.952,00	2.478.800,00	99.152,00
12	STP	2019	8.249.446,40	7.932.160,00	317.286,40
13	TELKOMSEL	2019	327.201,60	-	327.201,60
14	MITRATEL	-	-	-	-
15	IBS	-	-	-	-
16	JAVAINDO	2019	2.835.747,20	2.835.747,20	-
17	EPIDMENARA ASSECO	-	-	-	-
	JUMLAH		58.231.970,40	56.179.524,00	2.052.445,60
			58.231.969,60		

KOREKSI TAHUN 2022 ATAS SALDO PIUTANG 2021				TOTAL PIUTANG 2021 SETELAH KOREKSI TAHUN 2022				TOTAL PIUTANG 2022 KETETAPAN TAHUN 2022				TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021				TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022			
POKOK		DENDA		POKOK		DENDA		POKOK		DENDA		POKOK		DENDA		POKOK		DENDA	
Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
18.180.040,00	-	-	-	64.143.400,00	2.577.052,00	-	-	67.076.752,00	-	-	-	64.143.400,00	-	-	-	67.076.752,00	-	-	-
17.595.044,00	(436.268,00)	-	-	2.726.660,00	-	-	-	2.726.660,00	-	-	-	2.726.660,00	-	-	-	2.726.660,00	-	-	-
-	-	-	-	5.205.480,00	-	-	-	5.205.480,00	-	-	-	5.205.480,00	-	-	-	5.205.480,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654.403,20	-	-	-	-	-	-	-
5.453.360,00	(218.134,40)	-	-	-	-	-	-	13.385.520,00	-	-	-	13.385.520,00	-	-	-	13.385.520,00	-	-	-
(5.344.297,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.726.680,00	-	-	-	2.726.680,00	-	-	-	2.726.680,00	-	-	-	2.726.680,00	-	-	-
-	-	-	-	5.453.360,00	-	-	-	5.453.360,00	-	-	-	5.453.360,00	-	-	-	5.453.360,00	-	-	-
12.478.870,00	(89.152,00)	-	-	57.032.400,00	-	-	-	57.032.400,00	-	-	-	57.032.400,00	-	-	-	57.032.400,00	-	-	-
17.932.160,00	(317.288,40)	-	-	18.838.880,00	-	-	-	18.838.880,00	-	-	-	18.838.880,00	-	-	-	18.838.880,00	-	-	-
-	-	-	-	21.565.560,00	-	-	-	21.565.560,00	-	-	-	21.565.560,00	-	-	-	21.565.560,00	-	-	-
-	-	-	-	179.699.090,00	-	-	-	179.699.090,00	-	-	-	179.699.090,00	-	-	-	179.699.090,00	-	-	-
-	-	-	-	7.932.160,00	-	-	-	7.932.160,00	-	-	-	7.932.160,00	-	-	-	7.932.160,00	-	-	-
-	-	-	-	2.835.747,20	-	-	-	2.835.747,20	-	-	-	2.835.747,20	-	-	-	2.835.747,20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.881.695,80	(1.070.040,80)	-	-	19.385.827,20	981.604,80	-	-	177.521.246,00	6.811.488,00	-	-	177.521.246,00	6.811.488,00	-	-	177.521.246,00	6.811.488,00	-	-
136.024.537,60	-	-	-	-	20.177.432,00	-	-	384.362.728,00	-	-	-	384.362.728,00	-	-	-	384.362.728,00	-	-	-

PELUNASAN TAHUN 2022						TOTAL PELUNASAN 2021 DAN 2022	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022		TOTAL PIUTANG	PENYISIHAN	KETERANGAN
POKOK 2021		POKOK 2022		DENDA 2022			POKOK	DENDA			
IN	DE	IN	DE	IN	DE						
-	-	(64.448.800,00)	-	(1.388.966,00)	-	-	1.388.988,00	1.288.988,00	6.444,94		
-	-	(2.726.680,00)	-	(2.726.680,00)	-	-	-	-	-		
-	-	(5.208.480,00)	-	(5.208.480,00)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	16.360.080,00	654.403,20	17.014.483,20	8.507.241,50		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	(13.385.520,00)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	(2.726.680,00)	-	(2.726.680,00)	-	-	-	-	-		
-	-	(5.453.360,00)	-	(5.453.360,00)	-	-	-	-	-		
-	-	(57.012.400,00)	-	(57.012.400,00)	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	18.638.880,00	753.555,20	19.392.435,20	97.962,18		
-	-	(21.565.560,00)	-	(21.565.560,00)	-	-	-	-	-		
-	-	(175.499.040,00)	-	(177.799.040,00)	-	-	3.308.980,80	3.309.980,80	6.049,90		
-	-	(7.892.160,00)	-	(7.892.160,00)	-	-	-	-	-	644.493,60	
-	-	-	-	-	-	2.895.747,20	-	2.895.747,20	1.417.873,60		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	(358.882.960,00)	-	(358.882.960,00)	-	38.034.707,20	9.906.927,20	41.941.634,40	10.035.572,22		
-	-	(362.271.324,00)	-	(362.271.324,00)	-	-	-	41.941.634,40	10.035.572,22		

koreksi kesalahan-piutang menara piutang menara	38.054.537,60	58.231.970,40	saldo 2021
(Koreksi pengakuan saldo piutang 2021 karena adanya perubahan kontrak)		(38.054.537,60)	koreksi
piutang menara	22.091.404,00	20.177.432,80	
pendapatan menara		384.362.728,00	skrd 2022
(Pengakuan piutang retribusi menara 2022)		404.540.160,80	
padan diterima dimuka		(362.271.324,00)	pelunasan 2022
piutang menara	327.201,60	42.268.836,80	
(Koreksi pengakuan saldo pendapatan diterima dimuka 2021 yg digunakan utk bayar piutang 2021)	327.201,60	(327.201,60)	sewa diterima dimuka
Beban Penyisihan Piutang Menara	4.591.929,36	41.941.635,20	saldo 2022
Penyisihan Piutang Menara		(5.443.642,86)	saldo 2021
(Pengakuan atas tambahan penyisihan piutang dalam tahun 2022)	4.591.929,36	(10.035.572,22)	saldo 2022
		(4.591.929,36)	kenaikan